KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

UJI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
SATKER BID TIK POLDA JATENG

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN		JANGKA
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
1	Frequensi radio 800Mhz	– Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 30 Th. 2014 – Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j tentang informasi yang tidak boleh diungkapkan	Adanya penyadapan informasi internal polri	Kerahasiaan dan keamanan informasi	Selamanya
2	Internet Protocol dan Intranet	– Permen Kominfo Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permen 11/Per/M.Kominfo/07/2010 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protokol Television) – Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j tentang informasi yang tidak boleh diungkapkan	Pencurian data dan potensi disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data	Selamanya
3	Sandi komunikasi polri/Call Sign Polri	– Perkap No.19 Th. 2014 tentang Penyelenggaraan persandian di Lingkungan Polri – Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j tentang informasi yang tidak boleh diungkapkan	Tidak ada kerahasiaan dan keamanan bagi petugas operasional di lapangan dan dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Kerahasiaan dan keamanan bagi petugas operasional di lapangan	Selamanya

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN		JANGKA
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
		– Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c nomor 6 tentang system persandian negara			
4	Kirim terima berita mengenai internal Polri yang bersifat rahasia memuat petunjuk/arahan dari pimpinan, rencana operasi kepolisian, strategi dan mencantumkan struktur serta HTCK Polri yang dilaksanakan melalui Vicon maupun zoom meeting	– Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j tentang informasi yang tidak boleh diungkapkan – Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf a nomor 3 tentang mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan Transnasional	Adanya kebocoran berita dapat menghambat proses pelaksanaan operasi apabila disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab	Kelancaran dan kesuksesan dalam pelaksanaan operasi karena tidak terjadi kebocoran berita	Selama diperlukan pengecualian nya,namun dapat dilaksanakan press release hasil/prestasi selama pelaksanaan operasi
5	Sistem jaringan komunikasi yang digunakan untuk mendukung operasional polri (jaringan telepon/pstn, jaringan faximile, jaringan email, jaringan radio komunikasi digital trunking, jaringan vicon VPN-IP dan jaringan Vicon Flay Way)	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j tentang informasi yang tidak boleh diungkapkan	Adanya kebocoran berita dan data sehingga dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab	Terciptanya keamanan pada system jaringan komunikasi	Selamanya
6	Data pribadi Pejabat Utama Mapolda dan Kapolres Jajaran Polda Jateng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h. info yg diberikan dapat ungkap rahasia pribadi	Dimanfaatkan orang lain untuk tindak kejahatan penipuan dan lain-lain	tidak disalahgunakan orang lain	Selamanya

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN		JANGKA
			AKIBAT DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP	
7	Data pribadi Personel Bid TIK Polda Jateng	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h. info yg diberikan dapat ungkap rahasia pribadi	Dimanfaatkan orang lain untuk tindak kejahatan penipuan dan lain-lain	tidak disalahgunakan orang lain	Selamanya
8	User dan Password akses Email Dinas Polri	– Perkadiv TIK Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola E-mail Dinas Polri – Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j tentang informasi yang tidak boleh diungkapkan	Disalah gunakan orang lain dan berdampak pada keamanan sistem informasi	tidak disalahgunakan orang lain	Selamanya
9	User dan Password akses Cpanel Web/Aplikasi Jajaran Polda Jateng yang Hosting di Data Center Polri	– Undang-undang Nomor 19 tahun 2016. Tentang. Perubahan atas undang-undang. Nomor 11 tahun 2008. Tentang informasi dan transaksi elektronik – Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf j tentang informasi yang tidak boleh diungkapkan	disalahgunakan orang lain yang dapat mengganggu sitem keamanan dari web/aplikasi	keamanan web/aplikasi akan terjamin	Selamanya